

**KEBEbasan BERAGAMA DI INDONESIA**  
*Perspektif Teori Ruang Publik dan Ruang Privat Hannah Arendt*



Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Filsafat Islam ( S.Fil.I )

Disusun Oleh:

**FAHRI ANSYAH**  
**NIM. 031511490**

**JURUSAN AQIDAH DAN FILSAFAT**  
**FAKULTAS USHULUDDIN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
**2009**



## **NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan/prodi pada Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 24 Juli 2009  
Pembimbing

Dr. A lim Roswantoro, M. Ag.  
NIP. 150298986



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-07/RO

**PENGESAHAN**

Nomor : UIN.02/DU/PP.00.9/1265/2009

Skripsi dengan judul: *Kebebasan Beragama di Indonesia: Perspektif Teori Ruang Publik dan Ruang Privat Hannah Arendt*

Yang diajukan oleh:

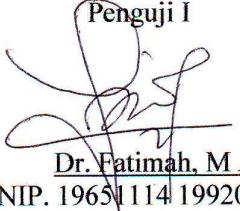
1. Nama : Fahri Ansyah
2. NIM : 03511490

Telah dimunaqosahkan pada: Kamis, 30 Juli 2009 dengan nilai : 9, 23 (A-) dan telah dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga.

**PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH:**

Ketua Sidang

Dr. Alim Roswantoro, M. Ag  
NIP. 19681208 199803 1 002

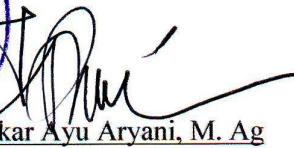
Pengaji I  
  
Dr. Fatimah, M.A  
NIP. 19651114 199203 2 001

Pengaji II  
  
Drs. Sudin, M. Hum  
NIP. 19600110 198903 1 001

Yogyakarta, 30 Juli 2009

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Ushuluddin  
DEKAN



  
Dr. Sekar Ayu Aryani, M. Ag  
NIP. 19591218 198703 2 001

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Fahri Ansyah

NIM : 03511490

Fakultas : Ushuluddin

Jurusan/ Prodi : Aqidah dan Filsafat

Alamat Asal : Jl. Anggrek No. 37C Palopo, Sulawesi Selatan 91921

Alamat Jogja : Jl. Kaliurang No. 95 Dsn. Nglaban, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta

No. Tlp : 081-227616163

Judul Skripsi : Kebebasan Beragama di Indonesia: Perspektif Teori Ruang

Publik dan Ruang Privat Hannah Arendt

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqosyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqosyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqosyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya saya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, Juli 2009  
Saya yang menyatakan,

Fahri Ansyah

## **Motto**

*“Dalam kepenuhan Yin, selalu ada secerah Yang, dan dalam kepenuhan Yang, selalu ada secerah Yin, yang masing-masing memiliki potensi untuk menang dan pada saatnya akan merekah”*

*(Kebijaksanaan China)*

## Persembahan

*Yang tercinta, kedua orang tua tuaku, yang dengan keringat dan jerih  
payahnya membangun pondasi yang kuat bagi masa depanku*

*Yang terkasih, ketujuh saudaraku, motivasi kalian adalah senjata  
bagiku*

*Yang tekenangan, ketujuh sahabatku, yang dengan semangatnya  
selalu mengingatkanku*

*Yang tersayang, “inOy”, hanya dengan mulah aku dapat melalui hari*

## ABSTRAKSI

Banyak kajian yang mengangkat kebebasan beragama sebagai temanya dengan berbagai perspektif yang berbeda. Namun, kajian tentang kebebasan beragama dengan fokus kebebasan beragama di Indonesia era Orde Baru hingga era Orde Reformasi dengan menggunakan perspektif teori ruang publik dan ruang privat Hannah Arendt belum banyak bahkan belum pernah dilakukan. Disinilah kemudian mengapa penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian ini.

Dalam melakukan kajian skripsi ini, penulis sepenuhnya tidak keluar dari dua rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu: 1) Bagaimana potret kebebasan beragama di Indonesia era Orde Baru hingga era Orde Reformasi? 2) Bagaimana permasalahan kebebasan beragama tersebut ketika dikaji dalam perspektif ruang publik dan ruang privat Hannah Arendt? Dengan demikian, kajian dalam skripsi ini bertujuan untuk menjawab dua masalah yang telah dirumuskan di atas.

Untuk mengkaji kedua masalah tersebut diatas, maka langkah yang dilakukan penulis dalam skripsi yaitu *pertama*, metode deskriptif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan Potret kebebasan beragama di Indonesia era Orde Baru hingga Orde Reformasi. *Kedua*, setelah mendeskripsikan gambaran diatas, penulis kemudian membaca dan memahami bagaimana potret kebebasan beragama di Indonesia tersebut dan juga membaca teori ruang publik dan ruang privat Hannah Arendt, serta relevansi antara keduanya. *Ketiga*, setelah memberikan gambaran tentang bagaimana potret kebebasan beragama di Indonesia, serta implikasi-implikasi yang timbul diranah publik, lalu membacanya dengan perspektif ruang publik dan ruang privat Hannah Arendt. Penulis kemudian memberikan pemahaman bagaimana seharusnya mensikapi masalah kebebasan beragama tersebut, dengan menggunakan teori ruang publik dan ruang privat serta paradigma komunikatif yang dimilikinya

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini adalah, bahwa Potret kebebasan beragama selama era Orde Baru masih belum menemukan format yang ideal untuk sebuah makna kebebasan. Terlalu banyaknya intervensi serta dominasi pemerintah dalam mengatur dan membatasi aktivitas politik dan kegiatan keagamaan, dan tidak memberikan ruang bagi ormas-ormas serta partai-partai politik untuk menentukan kebijakan dan berkembang. Baru kemudian di era Reformasi kebebasan itu mengalami pertumbuhan yang membawa angin segar bagi demokrasi.

Dengan mengkaji kebebasan beragama di Indonesia dalam dua Orde tersebut, penulis berkesimpulan bahwa, kepentingan-kepentingan tertentulah yang menyebabkan terjadinya krisis di ruang publik. Dan untuk menghilangkannya, diperlukan dialog dan menghapuskan dominasi serta penguasaan atas kepentingan tersebut, bukan tindakan represif sebagaimana Arendt tawarkan dalam paradigma komunikatifnya.

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Tidak ada ungkapan yang pantas penulis haturkan selain ungkapan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, yang telah meminjamkan ruang dan waktu-Nya, sehingga penulis dapat selalu bekerja, berkarya, serta bertindak sesuai dengan jalan yang diridhoinya insyaAllah. shalawat dan salam juga penulis haturkan kepada sang pemimpin umat, Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau.

Banyak kendala yang penulis alami dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini, namun berkat bantuan, motivasi, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat rampung dan semoga dapat berguna. Oleh karena itu tidak pantas kiranya jika penulis tidak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini:

1. Dr.Sekar Ayu Aryani, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Fahruddin Faiz, M. Ag. Selaku Ketua Jurusan dan Dr. H. Zuhri, S. Ag, M. Ag. Selaku Sekertaris Jurusan.
3. Dr. Alim Roswantoro, M. Ag. yang telah memotivasi ide yang coba penulis angkat dan memberikan catatan kritis, serta membimbing hingga akhirnya lahirlah karya sederhana dalam bentuk skripsi ini.

4. Segenap dosen aqidah dan filsafat yang telah sudi dan tidak bosan mengajar dan mendengar celotehan kami.
5. Ketujuh kesatria senden : Lendot, Titut, Moendut, Zhilut, A'at, Lia beserta suami tercinta Ali Ustman “Semoga menjadi keluarga Sakinah”. Terima kasih atas persahabat kita.
6. Tentunya tidak lupa sang wanita perkasa “Hannah Arendt”, yang telah meminjamkan idenya (maap ga sempat minta ijin langsung), untuk penulis gunakan membedah cakrawala politik yang semakin carut marut. Dan mengeluarkan penyakit kronis di dalamnya untuk disembuhkan.

Sebagai penutup, penulis berharap karya ini dapat berguna dan menjadi referensi bagi pembaca dan bagi siapa saja yang ingin melanjutkan estafet pemikiran Hannah Arendt.

*Wa'alaikumsalam Wr.Wb.*

Yogyakarta, juli 2009  
Penulis

Fahri Ansyah

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	i
<b>Nota Dinas</b> .....	ii
<b>Pengesahan</b> .....	iii
<b>Surat Pernyataan Keaslian</b> .....	iv
<b>Halaman Motto</b> .....	v
<b>Halaman Persembahan</b> .....	vi
<b>Abstrak</b> .....	vii
<b>Kata Pengantar</b> .....	viii
<b>Daftar Isi</b> .....	x

### **Bab I                    Pendahuluan**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	12
1. Pengumpulan Data.....	13
2. Pengolahan Data.....	14
3. Pendekatan.....	15
F. Sistematika Pembahasan.....	15

### **Bab II                    Kebebasan Beragama di Indonesia**

A. Kebebasan Beragama dalam Islam.....	19
B. Potret Kebebasan Beragama di Indonesia.....	22
1. Kebebasan Beragama Era Orde Baru.....	25
2. Kebebasan Beragama Era Reformasi.....	30
C. Konflik dan Kekerasan.....	34
1. Konflik Antar-agama.....	36
2. Faktor Konflik dan Faktor Damai.....	41

<b>Bab III</b>	<b>Ruang Publik dan Ruang Privat Perspektif Hannah Arendt</b>	
A.	Biographi Hannah Arendt.....	48
B.	Ruang Publik dan Ruang Privat.....	53
1.	Kepentingan Publik dan privat.....	60
2.	Distingsi antara Publik dan Privat .....	62
C.	Ruang Publik dan Kekuasaan.....	64
D.	Tindakan Politis sebagai Perwujudan Identitas Manusia.....	71
<b>Bab IV</b>	<b>Pembacaan atas Kebebasan Beragama di Indonesia dari Perspektif Ruang Publik dan Ruang Privat Hannah Arendt</b>	
A.	Dialog Antar-Agama.....	76
1.	Artifisialitas Kehidupan Publik.....	81
2.	Mengembangkan Wacana Pluralitas dalam keberagamaan.....	83
B.	Membangun Wacana Agama yang Toleran.....	87
C.	Menuju Keberagamaan yang Holistik.....	92
<b>Bab V</b>	<b>Penutup</b>	
A.	Kesimpulan.....	97
B.	Saran.....	99
<b>Daftar Pustaka</b> .....		101
<b>Biodata Penulis</b> .....		107

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan kebebasan beragama di Indonesia memang bisa dikatakan masih belum menemukan bentuk idealnya. Kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama masih tercermin dalam berbagai bentuk diskriminasi yang menimpa kelompok “sempalan” dari “mainstream” agama tertentu di kalangan pemeluk Islam, Kristen, Hindu dan yang lainnya. Disatu sisi, pemerintah dengan jelas menjamin kebebasan rakyatnya untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 29 ayat 2 UUD 45. Namun di sisi lain, pemerintah belum mampu bertindak tegas dalam menyelesaikan berbagai macam pelanggaran hak kebebasan beragama di Indonesia.<sup>1</sup>

Sudah enam puluh tahun lebih sudah berlalu, pasca berakhirnya perang dunia kedua, dimana hampir seluruh umat manusia larut dalam sukacita dan berbangga ketika mereka berhasil mendeklarasikan Hak Asasi Manusia (HAM), Dimana salah satu haknya adalah hak mengenai kebebasan dalam beragama, yaitu hak asasi manusia untuk memilih, menganut, memeluk, dan berpindah agama. Mereka berbangga karena hak-hak demikian tidak pernah mereka peroleh, paling tidak dalam bentuk dokumen tertulis yang telah disepakati oleh sebagian besar bangsa-bangsa di dunia. Tetapi, dengan telah dideklarasikannya Hak Kebebasan

---

<sup>1</sup>Editorial, *Menimbang Refleksi Kebebasan Beragama Tahun 2006*, dalam Suhadi Cholil. (ed). *Resonansi Dialog Agama dan Budaya: Dari Kebebasan Beragama, Pendidikan Multikultural, Sampai RUU Anti Pornografi*, (Yogyakarta: Center for Religius and Cross-Cultural Studies (CRCS), 2008), hlm. 183.

Beragama, kehidupan antarumat beragama di berbagai negara anggota PBB (Perserikataan Bangsa-Bangsa) bukannya berjalan tanpa masalah.

Dalam kenyataannya praktek dilapangan, dengan dalih HAM, institusi keagamaan yang mana pun dapat saja bertindak melampaui batas-batas kewajaran dalam merealisasikan hak-hak keagamaannya. Mereka dapat menarik, membujuk, merebut penganut agama tertentu untuk pindah ke agama lain baik secara terselubung maupun secara terang-terangan. Lebih-lebih karena salah satu dari sekian banyak *fundamental character* yang secara intrinsik melekat dalam bangunan keyakinan penganut agama-agama adalah kewajiban para pemeluknya untuk menawarkan “keselamatan” lewat versinya masing-masing kepada orang atau kelompok lain di luar kelompoknya.

Kekerasan kemudian menjadi hal yang lumrah ketika salah satu dari kelompok agama tadi mengklaim dirinya sebagai sebuah kebenaran tunggal dan beranggapan bahwa sesuatu yang berada di luar sistem mereka adalah sebuah kesalahan yang harus diluruskan. Lalu apakah agama kemudian dianggap menjadi kekuatan bagi perdamaian atau malah agresi, banyak bergantung pada bagaimana kita mengukur kapasitas manusia untuk hidup bersama secara damai.<sup>2</sup>

Pada saat yang sama, dalam kekerasan yang terjadi, ada sebagian kelompok yang menarik agama ke dalam wilayah konflik dan menjadikan sebagai alat legitimasi untuk berbuat kekerasan terhadap orang dan kelompok lain.<sup>3</sup> Secara apologis kiranya sangat mudah bagi kita untuk mengatakan bahwa kandungan

---

<sup>2</sup> Wim Beuken dan Karl Josef, *Agama sebagai Sumber Kekerasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 216.

<sup>3</sup> Abd A'la, *Melampaui Dialog Antar Agama*, (Jakarta: Kompas, 2002), hlm. Xi.

agama-agama pada dasarnya adalah *non-violent* (anti-kekerasan) dan manusialah, baik secara individu ataupun kolektif, yang menyelewengkan maknanya. Pendek kata, dalam praktik di lapangan, hak kebebasan beragama banyak menimbulkan masalah.

Maraknya konflik antaragama di berbagai belahan bumi yang telah menginjak-injak prinsip keadilan dan hak-hak asasi manusia serta merobek-robek keutuhan sebuah bangsa sudah tentu menghentakkan kesadaran kita untuk melakukan kritik dan redefinisi ulang terhadap kebebasan beragama dan peran sosialnya.<sup>4</sup>

Efek negatif yang ditimbulkan dari pelaksanaan Hak Kebebasan Beragama yang diinterpretasikan oleh masing-masing penganut agama sesuai dengan kepentingan (*vested interest*) mereka sendiri-sendiri ternyata lebih banyak merugikan daripada menguntungkan.

Agama-agama, sekalipun menurut banyak penelitian bukanlah sebagai alasan pemicu kerusuhan, tetapi selalu menjadi alat bahkan sasaran yang empuk dari kerusuhan-kerusuhan tersebut. Simbol-simbol agama yang dipakai ataupun yang dirusak, dibakar, mulai dari kata, kalimat yang diucapkan, ditulis sampai dengan gedung-gedung ibadah yang dihancurkan dan dibakar menunjukkan betapa rapuhnya sentuhan kemanusiaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di Indonesia.

Dalam kurun waktu tiga decade misalnya, agama-agama di Indonesia mengalami kehidupan yang tidak menentu. Dari segi kuantitas bisa dikatakan

---

<sup>4</sup> Nurcholis Madjid, *Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman*, (Jakarta: Kompas, 2001), hlm. 91.

masing-masing agama mengalami peningkatan yang lumayan banyaknya, sementara dari segi kualitas, dalam banyak segi perlu dipertanyakan. Keadaan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: dari agama-agama itu sendiri, sering ditemukan ada kelompok umat beragama yang masih sangat tertutup, "fundamentalis". Dan yang berfikir bertindak "eksklusif"; ada juga yang mengalami pencerahan, di mana umatnya masing-masing mengalami perubahan dalam berfikir, merespons, mengaktualisasikan ajaran-ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari; adanya berbagai macam pengaruh dari luar; apalagi di era globalisasi sekarang ini, pergaulan makin meluas, sentuhan-sentuhan pluralisme makin terasa.

Hal semacam ini menjadi dilema, karena di satu sisi kita adalah warga negara Indonesia, sebagai sebuah kesatuan unit politik serta publik yang tinggal di tempat yang sama, dan sudah seharusnya saling menjaga toleransi serta kerukunan antarumat bergama dan di satu sisi kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sudah selayaknya saling membantu dan menyayangi antara satu dengan yang lain tanpa harus melihat atribut keagamaan yang melekat pada diri kita.

Namun ketika agama kita kembalikan kepada fungsi dasar yang sebenarnya, yaitu sebagai jalan kebaikan, sedangkan konflik di antara umat manusia atas nama agama juga tetap banyak terjadi, maka sebenarnya kita bisa melihat secara lebih kritis, bahwa konflik itu sebenarnya mengatasnamakan dan berkedok agama. Melalui penegasan tentang fungsi dasar agama ini, kita bisa membuktikan bahwa sebenarnya konflik tersebut disebabkan oleh adanya invasi kepentingan-kepentingan privasi atau kelompok tertentu yang dimiliki oleh setiap

manusia ke wilayah publik.<sup>5</sup> Oleh karena itu, menjadi tidak masuk akal jika terjadi keributan, kerusuhan-kerusuhan sosial, bahkan mungkin peperangan, demi—diakibatkan oleh—suatu sikap mempertahankan agama tanpa adanya suatu kepentingan dibaliknya.

Keanekaragaman agama menjadi kekuatan bangsa manakala agama-agama mampu hidup berdampingan secara menyenangkan dalam sebuah negara. Dari perspektif keanekaragaman, situasi ini dapat diwujudkan jika masing-masing agama mengakui prinsip-prinsip umum sebagai landasan bersama dalam merespons situasi keanekaragaman.<sup>6</sup>

Keadaan seperti inilah yang juga menjadi perhatian Hannah Arendt. Suatu kondisi di mana manusia tidak lagi memiliki kemampuan untuk bertindak, dalam arti manusia tidak memahami makna pluralitas, makna tindakan politis yang membutuhkan kebebasan serta pluralitas.<sup>7</sup> Manusia sekedar menjadi instrumen belaka demi bekerjanya sebuah mesin politik atau kelompok besar seiring dengan hilangnya peran negara-bangsa dan agama sebagai pembentuk ruang publik. Individu-individu kemudian terdegradasi menjadi suatu massa konsumeristik bersamaan dengan hilangnya identitas mereka sebagai kesatuan politis. Singkatnya, negara-bangsa dan agama dewasa ini dilanda dilema dalam menjalankan perannya sebagai sebuah unit politik. Di satu pihak negara-bangsa tidak mampu bertahan apabila ia menutup diri terhadap arus deras kapitalisme. Di lain pihak ia juga tidak bisa begitu saja melayani kepuasan kapitalisme tersebut,

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 86.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 80

<sup>7</sup> Rieke Diah Pitaloka, *Kekerasan Negara Menular ke Masyarakat*, (Yogyakarta: Galang Press, 2004), hlm. 161.

melainkan juga harus tetap mampu menjalankan perannya sebagai sebuah unit politik.

Arendt yang hidup di era totalitarianisme Nazi Jerman memandang bahwa manusia sangatlah rapuh. Zamannya itu menaruh kecurigaan pada setiap pemikiran yang muncul sebagai bersifat ideologis; sebuah masa traumatis yang terus membayang-bayanginya.

Dalam mengartikan politik, Arendt lebih cenderung mengafirmasi Aristoteles yang memandang politik sebagai aktivitas *miteinander* (dialog, respirositas), yakni partisipasi semua warga dalam hidup bernegara. Baginya politik adalah tindakan yang merupakan wicara di ruang publik mengenai kepentingan bersama.<sup>8</sup> Menurut Arendt politik adalah aktivitas komunikasi antara orang-orang yang bebas dan setara dalam sebuah komunitas. Di dalam (aktivitas) politik tidak boleh ada pemaksaan dan kekerasan. Sementara itu kekuasaan dalam pandangan Arendt adalah solidaritas warga komunitas. Kekuatan muncul atau dihasilkan oleh tindakan warga yang saling berkomunikasi dan ia menampilkan wujud konkritisnya dalam institusi politik. Institusi politik menjaga ruang publik tempat komunikasi warga komunitas itu terus berlangsung.

Dalam pandangan Arendt dimensi sosial manusia menunjukkan bahwa kesosialan manusia mendahului individualitasnya. Politik yang menurut Arendt adalah tindakan sebagai wicara di ruang publik mengenai kepentingan publik, menuntut penampakan individu (manusia) pada sosialitas, dalam pluralitas. Penampakan manusia sebagai pribadi mengandaikan kebebasan yang

---

<sup>8</sup>Ismail Fahmi, "Tindakan Politis: Menimbang Pemikiran Aristotelian Hannah Arendt", dalam Jurnal Filsafat Driyarkara, edisi Th. XXVI, No. 1, September 2002, hlm. 29.

membuatnya terlahir kembali. Karenanya tindakan politis merupakan sebuah konfirmasi bahwa seorang pernah terlahir dan kemudian kembali terlahir dalam tindakannya.

Konsep ruang publik dan ruang privat dalam kaitannya dengan kesatuan politis, dimana kebebasan merupakan salah satu elemennya tanpa ada pemaksaan dan tindakan kekerasan, telah disajikan secara sederhana (akan di bahas lebih lanjut dalam bab IV) oleh penulis inilah yang dianggap menarik dan berguna untuk digunakan sebagai perspektif didalam mengkaji problem kebebasan beragama di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam melakukan penelitian ini Penulis merumuskan dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana potret kebebasan beragama di Indonesia era Orde Baru hingga era Orde Reformasi.
2. Bagaimana permasalahan kebebasan beragama tersebut ketika dikaji dalam perspektif ruang publik dan ruang privat Hannah Arendt.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kebebasan beragama di Indonesia era Orde Baru hingga era Orde Reformasi, serta Untuk mengkaji sejauh mana dampak kebebasan beragama di Indonesia ketika dilihat dari perspektif ruang publik dan ruang privat Hannah Arendt.

2. Adapun Kegunaan dari Penelitian yang dilakukan oleh penulis disini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi penulis, dan pembaca dalam memahami latar kebebasan beragama di Indonesia era Orde Baru hingga era Orde reformasi jika dilihat dari konteks sosial-politik.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi karya tulis ilmiah yang dapat digunakan untuk mengkaji problem kebebasan beragama atau problem-problem yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang privat di Indonesia dengan menggunakan perspektif konsep ruang publik dan ruang privat Hannah Arendt.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Politik tentang ruang publik dan ruang privat dalam kaitannya dengan kebebasan beragama mungkin belum banyak yang membicarakan, jika ditarik kedalam ranah pemikiran Hannah Arendt, maka sebagai langkah untuk membaca serta menganalisa hal tersebut, penulis menyertakan beberapa karya tulis yang mendukung.

Buku *Filsafat Politik Hannah Arendt* karya M. Passerin d'Enteves.<sup>9</sup>

Dalam buku ini memberikan rekonstruksi secara sistematis empat konsep filsafat politik utama yang melandasi karya-karya Arendt: modernitas, tindakan, penilaian, dan kewarganegaraan. D'Enteves menyajikan setiap konsep tersebut secara sistematis sambil melakukan penilaian-penilaian orisinal terhadap

---

<sup>9</sup>Maurizio P. d'Enteves, *Filsafat Politik Hannah Arendt*, terj. M. Shafwan, (Yogyakarta: Qalam, 2003).

modernitas Arendt. Tidak hanya itu, dengan kejelian kompetensi akademisnya, D'Enteves berhasil mengidentifikasi dua model tindakan dan dua konsepsi penilaian yang berbeda, serta relevansi teori politik Arendt baik perdebatan kontemporer mengenai hakikat dan ruang lingkup kewarganegaraan demokratis serta perdebatan tentang kebebasan beragama yang selalu menimbulkan polemik di dalam masyarakat khususnya Indonesia.

D'enteves menunjukkan bahwa konsepsi Arendt tentang kewarganegaraan yang aktif dan deliberasi demokratis bisa dijadikan sebagai kerangka terbaik untuk merumuskan hakikat agensi politik guna mengaktifkan kembali kehidupan publik dalam dunia modern.

Buku *Kekerasan Negara Menular ke Masyarakat* (2004) ditulis oleh Rieke Diah Pitaloka. Buku ini merupakan sebuah tesis Rieke guna meraih gelar Magister of Humaniora yang diberi judul, *Banalitas Kejahatan: Aku yang Tak Mengenal Diriku, Telaah Hannah Arendt Perihal Kekerasan Negara*. Dan untuk kepentingan publik yang lebih luas, maka tesis tersebut diterbitkan dengan judul Kekerasan Negara Menular ke Masyarakat<sup>10</sup>.

Buku *Melampaui Dialog Agama* (2002) yang ditulis Abd A'la.<sup>11</sup> Buku ini berupaya mengangkat persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kekerasan secara kritis, sebagai dampak dari akibat hilangnya komunikasi antar umat beragama, dalam mensikapi makna kebebasan beragama, serta mencari suatu solusi yang lebih menyegarkan dan bersifat transformatif sehingga dapat

---

<sup>10</sup>Rieke Diah Pitaloka, *Kekerasan Negara Menular ke Masyarakat*, (Yogyakarta: Galang Press, 2004).

<sup>11</sup>Abd A'la, *Melampaui Dialog Antar Agama*, (Jakarta: Kompas, 2002).

mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan yang sampai batas tertentu telah tergadaikan.

Buku *Pluralitas Agama kerukunan dalam keragaman* (2001) yang ditulis oleh Prof. Dr. Nurcholis Madjid.<sup>12</sup> Dalam buku ini berbicara tentang bagaimana etika dalam beragama dari perbedaan menuju persamaan. Mengangkat masalah-masalah besar yang belum terselesaikan dan malah semakin menyesakkan dada. Dimana salah satu masalah besar itu adalah kenyataan bahwa akhir-akhir ini kita meyaksikan dengan perasaan mencekam, suasana hubungan antarumat beragama di tanah air mulai terusik, bahkan telah pula menelan korban jiwa dan harta benda. Kearifan merupakan jalan keluar untuk melihat bahwa pluralitas janganlah dijadikan alasan untuk saling bermusuhan,

Buku ini menggambarkan suatu upaya untuk memperkaya serta memperluas wacana pluralitas agama dan kerukunan antarumat beragama. Pengkayaan dan perluasan wacana pluralitas serta kerukunan tadi selain sebagai sarana dialog tertulis juga dimaksudkan sebagai sosialisasi gagasan-gagasan pluralitas dan inklusivitas keagamaan di tengah masyarakat. Tentu, hal ini dilakukan guna membina dan melestarikan kehidupan beragama yang damai, toleran, saling menghormati dan memekarkan. Buku ini juga diharapkan dapat menjadi embun penyejuk bagi kehidupan umat beragama di Indonesia yang belakangan ini ikut terkoyak besamaan dengan terkoyaknya kehidupan ekonomi-sosial-politik kita sebagai bangsa.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Nurcholis Madjid, *Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman*, (Jakarta: Kompas, 2001).

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. xii.

Buku *Kebebasan Agama dan Hak-hak Asasi Manusia* (1997) yang disusun oleh David Little, John Kelsay dan Abdulaziz A. Sachedina.<sup>14</sup> Buku ini merupakan esai tentang etika agama perbandingan yang disusun sesuai dengan permasalahan hak asasi manusia. Penekanan perhatian terhadap hubungan antara agama dan hak-hak asasi manusia-tentang berbagai cara tradisi-tradisi agama tertentu, juga problem-problem klaim tentang hak-hak asasi manusia di dunia yang berbeda secara kultural.

Buku *Islam Mazhab Kritis: Menggagas keberagaman Liberatif* (2004) yang ditulis oleh Ahmad Fuad Fanani.<sup>15</sup> buku ini berbicara tentang prinsip keterbukan Islam terhadap agama atau paham lain yang juga berorientasi pada kebenaran.sikap kritis yang terdapat dalam keber-Islaman yang berani menentang dan melawan semua ketidakadilan. Entah dalam bentuk ketidakadilan interpretasi agama, persoalan politik, ataupun penindasan sesama manusia.

Buku *Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan, Menjalin Kebersamaan* (2003) yang ditulis oleh Muhamad Ali.<sup>16</sup> Buku ini berbicara tentang bagaimana membangun interaksi intern umat beragama dan antar-umat beragama, yang tidak hanya dapat berkoeksistensi secara harmonis dan

---

<sup>14</sup>David, Little, Kelsay J, Sachedina A, *Kebebasan Agama dan Hak-hak Asasi Manusia: Kajian Lintas Kultural Islam-Barat*, terj. Riyanto, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bekerjasama dengan ACAdeMIA, 1997).

<sup>15</sup>Ahmad Fuad Fanani, *Islam Mazhab Kritis: Menggagas Keberagaman Liberatif*, (Jakarta: Kompas), 2004.

<sup>16</sup>Muhamad Ali, *Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan, Menjalin Kebersamaan*, (Jakarta: Kompas, 2003).

damai, tetapi juga bersedia aktif dan proaktif dalam menyelesaikan masalah-masalah bersama dengan etika kemanusiaan.

Buku *Islam dan Pluralitas: Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan* (1999) ditulis oleh DR. Muhammad Imarah.<sup>17</sup> Buku ini berbicara tentang pluralitas serta kemajemukan yang didasari oleh keutamaan (keunikan) dan kekhasan, serta pentingnya masalah ini dalam wacana pemikiran kita, lokal maupun internasional, bagaimana pengaruhnya yang besar bagi masa depan kita, sebagai umat dan manusia, adanya beberapa pernyataan yang meragukannya, atau dianggap tidak jelas, serta banyak pula yang mengingkarinya, dalam buku ini diperjelas dan diperinci dengan lengkap, serta diungkapkan masalah-masalah dan batasan-batasan pluralitas tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis kemudian berkesimpulan bahwa skripsi yang berjudul *Kebebasan Beragama di Indonesia: Perspektif Ruang Publik dan Ruang Privat Hannah Arendt* ini masih orisinil, karena penelitian yang mencoba mengkaji kebebasan beragama di Indonesia dari perspektif Hannah Arendt belum pernah ditulis sebelumnya. Karena alasan tersebut, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian ini.

## E. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, peneliti mendasarkan pada sumber-sumber kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data-data, serta referensi-refensi yang terkait dengan tema

---

<sup>17</sup>Muhammad Imarah, *Islam dan Pluralitas: Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999).

kebebasan beragama dan yang terkait dengan pemikiran-pemikiran Hannah Arendt, untuk kemudian diklasifikasikan lalu kemudian dianalisa.

### 1. Pengumpulan data

Sebagai langkah untuk melengkapi data-data panelitian, penulis mengumpulkan data-data serta referensi-referensi yang terkait dengan kedua tema diatas, kemudian memilah dan membagi sumber data penelitian tersebut menjadi dua, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya-karya yang berkaitan dengan konteks pluralitas dan kebebasan beragama di Indonesia seperti: *Pluralitas Agama: Kerukunan dalam Beragama*, (Jakarta: Kompas, 2001) karya Nurcholis Madjid, dan *Kebebasan Agama dan Hak-hak Asasi Manusia: Kajian Lintas Kultural Islam-Barat*, terj. Riyanto, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bekerjasama dengan ACAdemia, 1997) karya David Little dkk, serta karya Hannah Arendt yang berbicara tentang ruang publik dan ruang privat, serta karya yang terkait didalamnya seperti: *The Human Condition*, (Chicago and London: The Chicago University Press, 1998), dan *Asal Usul Totalitarianisme* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995).

Sedangkan sumber sekunder dalam penelitian ini adalah karya-karya yang membahas tentang dampak yang muncul di masyarakat ketika kebebasan beragama diinterpretasikan oleh masing-masing penganut agama sesuai dengan kepentingan meraka sendiri-sendiri. Diamana kekerasan kemudian selalu muncul dan menjadi menu utama di dalamnya.

Adapun karya-karya lainnya yang juga berbicara tentang Hannah Arendt, dan teori ruang publik dan ruang privat serta karya-karya orang lain yang berbicara tentang hal yang sama, juga digunakan penulis sebagai alat baca untuk menganalisis data-data primer dan sekunder.

## 2. Pengolahan Data

Setelah data-data serta referensi-referensi sudah terkumpul dari sumber-sumber primer dan sekunder tadi, penulis kemudian melakukan pengolahan data dengan beberapa langkah-langkah. Adapun langkah *pertama* yaitu metode deskriptif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan Potret kebebasan beragama di Indonesia era Orde Baru hingga Orde Reformasi.<sup>18</sup>

*Kedua*, setelah mendeskripsikan gambaran diatas, penulis kemudian membaca dan memahami bagaimana potret kebebasan beragama di Indonesia tersebut dan juga membaca teori ruang publik dan ruang privat Hannah Arendt, serta relevansi antara keduanya.

*Ketiga*, setelah memberikan gambaran tentang bagaimana potret kebebasan beragama di Indonesia, serta implikasi-implikasi yang timbul diranah publik, lalu membacanya dengan perspektif ruang publik dan ruang privat Hannah Arendt. Penulis kemudian memberikan pemahaman bagaimana seharusnya mensikapi masalah kebebasan beragama tersebut, dengan menggunakan teori ruang publik dan ruang privat serta paradigma komunikatif yang dimilikinya

---

<sup>18</sup>Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet. XII (Yogyakarta: Kanisius, 2004) hlm. 54.

### 3. Pendekatan

Dalam pengolahan data-data tersebut, termasuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan data-data. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan filosofis. Pendekatan historis merupakan pendekatan yang selalu melihat peristiwa dari akar sejarahnya.<sup>19</sup> Pendekatan ini perlu untuk melihat sejauh mana implementasi kebebasan beragama di Indonesia.

Adapun pendekatan filosofis yang digunakan penulis untuk mengkaji problem kebebasan beragama di Indonesia melalui kacamata atau konsep ruang publik dan ruang privasi Hannah Arendt secara kritis dan terbuka.

## F. Sistematika Pembahasan

Bab I : Pendahuluan. Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, menggambarkan problem kebebasan beragama di Indonesia, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasannya.

Bab II: dalam bab ini berbicara tentang kebebasan beragama secara umum, Pandangannya dalam Islam dan bagaimana pelaksanaannya di Indonesia khususnya era Orde Baru hingga era Orde Reformasi.

Bab III: dalam bab ini berbicara tentang konsep ruang publik dan ruang privat Hannah Arendt. Bagaimana kepentingan antara yang publik dan yang privat sering memunculkan distingsi antara keduanya

---

<sup>19</sup> Syaifudin Zuhri, “*Gerakan Oposisi Islam Masa Reformasi: Studi Terhadap Majelis Mujahidin Indonesia*”, dalam Jurnal *Sosiologi Agama*, Vol. I, No. 1, Juni 2007, hlm. 48-49.

Bab IV: dalam bab ini berisi tentang pembacaan atau kajian dari penulis atas potret kebebasan beragama di Indonesia era Orde Baru hingga Orde Reformasi jika di lihat dalam kacamata pemikiran dan konsep ruang publik dan ruang privat seorang Hannah Arendt.

Bab V: bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini dan juga bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis, berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan oleh penulis, serta berisi daftar pustaka yang dijadikan dasar penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah membahas serta mengkaji permasalahan dari potret kebebasan beragama di Indonesia dengan menggunakan perspektif ruang publik dan ruang privat Hannah Arendt yang dilakukan penulis dalam skripsi ini, maka penulis kemudian menyimpulkan bahwa:

1. Potret kebebasan beragama selama era Orde Baru masih belum menemukan format yang ideal untuk sebuah makna kebebasan. Segala bentuk intervensi serta dominasi pemerintah dalam mengatur tatanan beragama, kehidupan berbangsa dan bernegara, sangat ketat, sehingga Ormas-ormas, sebagai representasi dari masyarakat madani (*civil society*), dan partai-partai politik, sebagai representasi masyarakat politik (*political society*), kurang memiliki otonomi yang cukup untuk menentukan kebijakan organisasi masing-masing. Baru kemudian, setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru, agresivitas massa mulai muncul dimana-mana. Ditambah dukungan pemerintah reformasi pada pluralisme politik membawa dampak pada munculnya “euforia demokrasi” dan seakan membawa kembali angin segar untuk kebebasan beragama. Dimana-mana rakyat dapat mengekspresikan pendapatnya secara bebas. Namun sayangnya banyak di antara warga negara, yang secara umum tingkat pendidikannya memang masih rendah, dan pemahaman akan makna kebebasan yang minim belum cukup memiliki budaya demokratis dalam

mengadapi perbedaan-perbedaan. Dan hal ini menimbulkan ekses munculnya konflik terbuka dan bentrokan fisik diantara beberapa kelompok sosial, baik atas dasar suku, agama, maupun hanya sekadar perbedaan areal tempat tinggal. Konflik ini tidak hanya menodai perkembangan pluralisme politik, melainkan juga pluralisme sosial, yang sebenarnya sudah lama terwujud. Munculnya konflik-konflik tersebut memang tidak terlepas dari adanya provokator untuk kepentingan politik tertentu. Namun, peristiwa-peristiwa tersebut tidak akan muncul jika budaya demokratis dan budaya toleransi yang mapan sudah dimiliki oleh seluruh warga negara.

Oleh karena itu, diperlukan dukungan kepada kedua bentuk pluralisme tersebut secara keseluruhan. Dalam konteks pluralisme politik adalah dengan pemerataan dan pemberian otonomi kepada daerah agar tidak ada lagi kesenjangan sosial ekonomi. Dan dalam konteks pluralisme sosial, peran para tokoh masyarakat dan tokoh agama seharusnya tetap konsisten mendukung toleransi dan menghindarkan pernyataan-pernyataan yang dapat memancing emosi warganya atau kebencian satu kelompok masyarakat dengan lainnya.

2. Setelah menggambarkan potret kebebasan beragama di Indonesia dan mengkaji dalam perpektif ruang publik dan ruang privat Hannah Arendt, penulis kemudian berpendapat bahwa adanya kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing kelompok tertentu yang menyebabkan terjadinya krisis di ranah ruang publik. Penafsiran-penafsiran atas suatu pemahaman yang tidak tepat dalam ranah privat juga akan menimbulkan ekses munculnya konflik dan

invasi ke ranah publik, dan hal ini akan menciptakan distorsi di antara keduanya. Oleh karenanya Hannah Arendt berpendapat bahwa segala bentuk penguasaan dan dominasi harus dihilangkan (eliminasi), dan dialog untuk membicarakan penyelesaian permasalahan dan bukan tindakan represif merupakan solusi yang tepat sebagaimana ia tawarkan dalam paradigma komunikatifnya yang memandang bahwa aktivitas politik merupakan aktivitas *meiteinander* (dialog, resiprositas). yakni partisipasi semua warga dalam hidup bernegara. Dan baginya politik adalah tindakan yang merupakan wicara di ruang publik mengenai kepentingan bersama.

## **B. Saran-saran**

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini setidaknya dapat memberikan gambaran bagaimana potret kebebasan beragama di Indonesia era Orde Baru hingga era Orde Reformasi. Konflik-konflik apa yang muncul ketika kebebasan beragama menyentuh ranah publik dan privat, kemudian memberikan solusi seperti apa yang tepat untuk mendamaikan keduanya. Meski demikian, masih banyak tema-tema lainnya, selain tema kebebasan beragama di Indonesia yang juga menarik untuk dikaji dengan menggunakan perspektif ruang publik dan ruang privat Hannah Arendt.

Selain itu, karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka akan lebih baik jika ada penelitian atau kajian lanjutan berupa penelitian lapangan. Dengan demikian, antara penelitian kepustakaan yang telah dilakukan penulis ini

dengan penelitian lanjutan yang berupa penelitian lapangan tersebut akan saling melengkapi.

Hasil kajian yang telah diperoleh penulis dalam skripsi ini tentunya dapat menjadi rujukan bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian lanjutan, baik yang berupa penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan tentang kebebasan beragama dengan tema yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- A'la, Abd, *Melampaui Dialog Agama*, Jakarta: Kompas, 2002
- Ahmed, Abdullah, *Dekonstruksi Syari'ah: wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin as-Rany, Yogyakarta: LkiS, 1994
- Ali Muhamad, *Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan, Menjalin Kebersamaan*, Jakarta: Kompas, 2003
- Amstrong, Karen, *Sejarah Tuhan: Kisah Pencarian Tuhan Yang Dilakukan Oleh Orang-Orang Yahudi, Kristen, dan Islam Selama 4000 Tahun*, terj. Zaimul Am, cet. XII, Bandung: Mizan, 2007
- Antonius, Reza, *Melampaui Negara Hukum Klasik: Locke, Rousseau, Habermas*, Yogyakarta: Kanisuis, 2007
- Arendt, Hannah, *Asal-Usul Totalitarisme, jilid I, Antisemitisme*, terj. A. Agus Nugroho, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993
- \_\_\_\_\_, *Asal-Usul Totalitarisme jilid II, Imperialisme*, terj. A. Agus Nugroho dan J. M. Subijanta, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995
- \_\_\_\_\_, *Asal-Usul Totalitarisme jilid III, Totalitarisme*, terj. J.M Soebijanta, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995
- \_\_\_\_\_, *Einchmann In Jerusalem: A Report On The Banality Of Evil*, (edisi revisi dan perluasan), New York: Penguin, 1994
- \_\_\_\_\_, *The Human Condition*, Chicago and London: The Chicago University Press, 1998
- Aristoteles, *Politics*, terj. H. Rackham M.A, London: William Heinmann Ltd, 1967

- Beilharz, Peter, *Teori-teori Sosial: Observasi terhadap Para Filosof Terkemuka*, terj. Sigit Jatmiko, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Beuken, Wim. Kuschel, K. Josef, dkk, *Agama Sebagai Sumber Kekerasan?*, terj. Imam Baehaqie, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Caputo, John, *Agama Cinta Agama Masa Depan*, Bandung: Mizan, 2003
- Cholil, Suhadi. (ed). *Resonansi Dialog Agama dan Budaya: Dari Kebebasan Beragama, Pendidikan Multikultural, Sampai RUU Anti Pornografi*, cet. I. Yogyakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), 2008
- D'Enteves, M. *Passerin, Filsafat Politik Hannah Arendt*, terj. M. Shafwan, Yogyakarta: Qalam, 2003
- El-Affendi, Abdel Wahab, *Masyarakat Tak Bernegara: Kritik Teori Politik Islam*, Yogyakarta: LKis, 2001
- Effendy, Bahtiar, *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan: Perbincangan Mengenai Islam, Masyarakat Madani dan Etos Kewirausahaan*, Yogyakarta: Galang Press, 2001
- Ettinger, Elzbieta, *Selingkuh Dua Pemikir Raksasa: Hannah Arendt-Martin Heidegger*, terj. P. Hasudungan dan R. Hindryati, Jakarta: Nalar, 2005
- Fanani, F. Ahmad, *Islam Mazhab Kritis: Menggagas Keberagamaan Liberatif*, Jakarta: Kompas, 2004
- Gibbons, Michael. T, *Tafsir Politik: Telaah Hermeneutis Wacana Sosial-Politik Kontemporer*, terj. Ali Noer Zaman, Yogyakarta: Qalam, 2002
- Habermas, Jurgen, *Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis*, terj. Yudi Santoso, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007
- Hamka, *Hak-hak Asasi Manusia antara Deklarasi PBB dan Islam*, Jakarta: Panjimas, 1971

- Hardiman, F. Budi. *Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik & Postmodernisme Menurut Jürgen Habermas*, cet. V. Yogyakarta: Kanisius, 1993
- Imarah, Muhammad, *Islam dan Pluralitas: Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999
- Jongeneel, J.A.B, *Hak Atas Kebebasan Beragama: Menurut Deklarasi-deklarasi dan Konvensi-konvensi PBB dan Undang-undang R.I*, Jakarta: Gunung Mulia
- Kymlicka, Will, *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus atas Teori-teori Keadilan*, terj. Agus Wahyudi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Lechte, John, *50 Filsuf Kontemporer: Dari Strukturalisme sampai Postmodernitas*, terj. A, Gunawan, Yogyakarta: Kanisius, 2001
- Little, David. Kelsay J, Sachedina A, *Kebebasan Agama dan Hak-hak Asasi Manusia: Kajian Lintas Kultural Islam-Barat*, terj. Riyanto, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bekerjasama dengan ACAdemIA, 1997
- Madjid, Nurcholish, *Pluralitas Agama: Kerukunan dalam Beragama*, Jakarta: Kompas, 2001.
- Montgomery, Watt, *Islam*, terj. Imron Rosjadi, Yogyakarta: Jendela, 2002
- Mudhofir, Ali, *Kamus Filsuf Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Mulia, Musdah, *Menuju Kebebasan Beragama di Indonesia* dalam Abd Hakim dan Yudi Latif (penyunting), *Bayang-bayang Fanatisisme*, Cet. I. Juli Jakarta: PSIK Universitas Paramadina, 2007
- Naipospos, Bonar Tigor (ed), *Tunduk pada Penghakiman Massa: Pemberan Negara atas Persekusi Kebebasan Beragama & Berkeyakinan*, Jakarta: SETARA Institute, 2007
- Pitaloka R. Diah, *Kekerasan Negara Menular ke Masyarakat*, Yogyakarta: Galang Press, 2004

- Qardlawi, Yusuf, *Sistem Masyarakat dalam al-Qur'an dan Sunnah*, terj. Abdus Salam Masykur, Solo: Citra Islami Press, 1997
- Rachman, Budhy Munawar (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin dalam Syarah*, Jakarta: Paramadina, 1995
- Rawls, John, *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Said, Edward. W, *Kekuasaan, Politik, dan Kebudayaan*, terj. Hartono. H dan Setiyawan Alkhatab, : Pustaka Promethea, 2003
- Saidi, Anas. (ed), *Menekuk Agama, Membangun Tahta*, cet. I. Depok: Desantara, 2004
- Schmandt, Henry. J, *Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*, terj. Ahmad Baidowi dan Imam Baehaqi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2002.
- Sirry, Mun'im. A. (ed.), *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina Bekerjasama dengan The Asia Foundation
- Tibi, Bassam, dkk, *Etika Politik Islam: Civil Society, Pluralisme, dan Konflik*, terj. Abu Bakar dkk, Jakarta: International Center for Islam and Pluralism (ICIP), 2005
- Turner, Bryan, *Sosiologi Islam: Suatu telaah Analitis atas Tesa Sosiologi Weber*, Jakarta: Rajawali, 1984
- Usman, Ali (ed), *Kebebasan dalam Perbincangan Filsafat, Pendidikan, dan Agama*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006,
- Wafie, Abdul Wahid, *Kebebasan dalam Islam*, terj. T. Fuad Wahab, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994
- Wattimena, Reza, *Melampaui Negara Hukum Klasik: Locke-Rousseau-Habermas*, Yogyakarta: Kanisius, 2007

Yusuf, Asror. *Agama Sebagai Kritik Sosial di Tengah Arus Kapitalisme Global*, Yogyakarta: IRCiSoD Bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri, 2006

### **Lainnya**

Fahmi, Ismail. “*Tindakan Politis: Menimbang Pemikiran Aristotelian Hannah Arendt*”, dalam Jurnal Filsafat Driyarkara, edisi thn. XXVI, no. 1, September 2002

Kedutaan Amerika Serikat. *Laporan Kebebasan Beragama Internasional 2003* Biro Demokrasi, Hak-Hak Asasi dan Perburuhan *Public Affairs Section*

Mulia, Siti Musdah. “*Menuju Kebebasan Beragama*” dalam Chandra Setiawan dan Asep Mulyana (ed)

Musdah, Siti Mulia, *Potret Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Di Era Reformasi* Disajikan pada Lokakarya Nasional Komnas HAM “Penegakan HAM dalam 10 Tahun Reformasi”, di Hotel Borobudur Jakarta, 8 – 11 Juli 2008

Nugroho, Ito. *Dilema Negara-Bangsa dalam Perpektif Hannah Arendt*, dalam Jurnal Filsafat Driyarkara, edisi thn. XXVI, no. 1, September 2002

Rikardus, Rahmat, “*Hannah Arendt: Krisis Kekuasaan Sebagai Krisis Berpikir*”, dalam Jurnal Filsafat Driyarkara, edisi thn. XXVI, no. 1, September 2002

Roswantoro, Alim. *Kekuasaan Perpektif Filoofis dan Realitas Politik di Indonesia*.

Rumadi, *Kompas*, Jumat, 15 Oktober 2004

Said Agil Sirodj. *Reposisi Terhadap Dialog antar Umat Beragama*, dalam *Opini* harian *Kompas*, Edisi : 18 Februari 2004.

Sekretariat Jendral MPR RI, *Risalah Rapat-Rapat Panitia Ad Hoc BP MPR*, Buku Kedua Jilid 3C Jakarta

Sumarwan, “*Politik Sebagai Komunikasi Sebuah Komunitas: Politik Menurut Hannah Arendt*”, dalam Jurnal Filsafat Driyarkara, edisi thn. XXVI, no. 1, September 2002

Zuhri, Syaifudin. “*Gerakan Oposisi Islam Masa Reformasi: Studi Terhadap Majelis Mujahidin Indonesia*”, dalam Jurnal Sosiologi Agama, Vol. I, No. 1, Juni 2007.

**BIODATA PENULIS**

Nama : Fahri Ansyah  
TTL : Masamba 14 November 1980  
Alamat Rumah : Jl. Anggrek No. 37C. Palopo, Sulawesi Selatan

**Nama Orang Tua**

Ayah : Syamsul Bachri  
Ibu : Nursia

**Riwayat Pendidikan**

1986 – 1992 : SDN No. 74 Pajalesang Palopo  
1992 – 1995 : SMPN 3 Palopo  
1995 (kelas 1) : MAN Palopo  
1999 – 2001 : SMU Muhammadiyah 6 Yogyakarta  
2003 – 2009 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta